

Kepemimpinan Digital dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data pada E-Government di Diskominfo Kota Padang

Digital Leadership and Data-Driven Decision Making in E-Government at Diskominfo Padang City

Nurul Hidayah Salsabilla¹, Padrison², Nora Eka Putri³, Adil Mubarak⁴

Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

ARTICLE INFO

Article history:

Received 20 May 2026

Revised 25 May 2026

Accepted 30 May 2026

Available online 05 June 2026

Keywords

Digital Leadership, Decision Making, E-Government, Data, Diskominfo Padang City

Keywords

Kepemimpinan Digital, Pengambilan Keputusan, E-Government, Data, Diskominfo Kota Padang



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study aims to examine digital leadership in data-driven decision-making during the e-government era, using the Office of Communication and Informatics (Diskominfo) of Padang City as the contextual framework. Digital leadership has become an urgent need for public sector organizations required to adapt to information technology transformation. This study employs a literature review method by analyzing and synthesizing relevant journals, scientific articles, and policy documents. The findings indicate that effective digital leadership requires leaders to utilize data as a systematic basis for decision-making. In the context of Diskominfo as the leading sector for e-government at the regional level, several critical factors determine successful implementation, including digital leadership competency, data infrastructure integration, and organizational culture transformation. This study recommends strengthening digital leadership capacity through training, developing integrated data systems, and transforming organizational culture toward a data-driven bureaucracy.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepemimpinan digital dalam proses pengambilan keputusan berbasis data pada era e-government, dengan menggunakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Padang sebagai konteks pembahasan.

Kepemimpinan digital menjadi kebutuhan mendesak bagi organisasi sektor publik yang dituntut beradaptasi dengan transformasi teknologi informasi. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur (literature review) dengan menganalisis dan mensintesis berbagai jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemimpinan digital yang efektif mensyaratkan kemampuan pemimpin dalam memanfaatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan secara sistematis. Dalam konteks Diskominfo sebagai leading sector e-government di daerah, terdapat beberapa faktor kritis yang menentukan keberhasilan implementasinya, antara lain kompetensi digital pimpinan, integrasi infrastruktur data, dan transformasi budaya organisasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas kepemimpinan digital melalui pelatihan, pengembangan sistem data terintegrasi, dan transformasi budaya organisasi menuju birokrasi berbasis data.

PENDAHULUAN

E-government merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan kepada warga, dunia usaha, maupun antar instansi. Di Indonesia, kebijakan e-government dimulai dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menjadikan transformasi digital sebagai kewajiban seluruh instansi pemerintah menuju tata kelola yang terbuka dan berbasis data (Kristian et al., 2024).

Era revolusi industri 4.0 dan transformasi digital telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, dituntut untuk bertransformasi dari birokrasi

*Corresponding Author

Email: nurulsalsabilla102@gmail.com*, padrisonlublay@gmail.com, noraekaputri@fis.unp.ac.id, adilmubarak@fis.unp.ac.id

konvensional menuju birokrasi digital yang responsif, efisien, dan berbasis data. Dalam konteks inilah konsep e-government menjadi semakin relevan sebagai upaya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik (Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2018).

Pengambilan keputusan merupakan salah satu fungsi inti kepemimpinan dalam organisasi publik. Kualitas sebuah keputusan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pemimpin mampu memanfaatkan informasi dan data yang tersedia secara akurat, cepat, dan relevan. Dalam era digital, pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*) menjadi pendekatan yang semakin diperlukan agar kebijakan dan keputusan yang diambil tidak hanya bersandar pada intuisi semata, tetapi didasarkan pada bukti dan fakta yang terukur (Wujarso et al., 2023).

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Padang sebagai instansi yang secara langsung bertanggung jawab atas pengelolaan sistem informasi dan infrastruktur digital pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam mendorong implementasi e-government. Namun, pertanyaan mendasar yang muncul adalah sejauh mana pemimpin di instansi tersebut telah menerapkan kepemimpinan digital dalam proses pengambilan keputusannya.

Kepemimpinan digital (*digital leadership*) hadir sebagai respons terhadap tuntutan era transformasi teknologi yang semakin kompleks. Pemimpin digital bukan hanya dituntut menguasai teknologi secara teknis, tetapi juga harus mampu membangun visi transformasi digital, mengelola perubahan organisasi secara menyeluruh, serta mendorong seluruh ekosistem birokrasi untuk beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika teknologi yang terus berkembang. Penelitian di berbagai instansi pemerintah menunjukkan bahwa kepemimpinan digital yang efektif secara konsisten berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas layanan publik digital dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Aditya & Kosasih, 2024; Cahyarini, 2021).

Berbagai kajian literatur yang telah ada di Indonesia masih terfragmentasi: sebagian besar membahas kepemimpinan digital secara umum atau e-government secara terpisah, tanpa mengintegrasikan keduanya dalam satu kerangka analisis yang komprehensif dan kontekstual. Kajian yang secara spesifik menelaah bagaimana kepemimpinan digital memengaruhi kualitas pengambilan keputusan berbasis data di instansi Diskominfo daerah masih sangat terbatas dalam literatur akademik administrasi publik Indonesia. Kesenjangan literatur inilah yang mendorong penelitian ini untuk menyusun kajian yang lebih terintegrasi dan aplikatif, khususnya dalam konteks Diskominfo Kota Padang sebagai salah satu instansi kunci dalam ekosistem e-government daerah.

Berdasarkan kajian awal terhadap literatur, masih terdapat kesenjangan antara ketersediaan infrastruktur digital dan kemampuan pemimpin dalam memanfaatkan data sebagai basis keputusan di banyak instansi pemerintah daerah. Kondisi ini mendorong perlunya kajian mendalam mengenai bagaimana kepemimpinan digital seharusnya diimplementasikan dalam proses pengambilan keputusan berbasis data, khususnya dalam konteks Diskominfo Kota Padang (Maritha, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan karakteristik kepemimpinan digital dalam konteks Diskominfo Kota Padang; (2) menganalisis proses ideal pengambilan keputusan berbasis data oleh pemimpin di era e-government; dan (3) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat kepemimpinan digital dalam pengambilan keputusan berdasarkan kajian literatur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur atau kajian pustaka. Sugiyono (2019) menyatakan bahwa studi literatur merupakan ringkasan tertulis dari jurnal, artikel, buku-buku, atau dokumen lain yang berisi uraian informasi yang relevan dengan judul penelitian. Penelitian ini dilakukan tanpa terjun langsung ke lapangan, melainkan melalui pengumpulan dan analisis terhadap artikel-artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan topik yang dikaji, yaitu kepemimpinan digital, pengambilan keputusan berbasis data, dan implementasi e-government.

Proses kajian literatur dilakukan melalui tiga tahap berikut:

1. Tahap identifikasi, yaitu penelusuran literatur secara sistematis menggunakan kata kunci seperti 'kepemimpinan digital', 'digital leadership', 'pengambilan keputusan berbasis data', dan 'e-government' melalui basis data jurnal nasional seperti Google Scholar, SINTA, dan portal jurnal perguruan tinggi.
2. Tahap seleksi, yaitu pemilihan literatur yang relevan berdasarkan kesesuaian topik, kemutakhiran (terbitan tahun 2021–2025), dan kredibilitas sumber.
3. Tahap analisis dan sintesis, yaitu pengkajian mendalam terhadap isi literatur untuk mengidentifikasi temuan, pola, dan kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Diskominfo Kota Padang digunakan sebagai konteks pembahasan untuk memberikan relevansi dan kerangka analisis yang lebih konkret, dengan merujuk pada dokumen resmi instansi, laporan kinerja, dan kebijakan e-government yang tersedia secara publik. Pendekatan ini memungkinkan kajian yang mendalam terhadap fenomena kepemimpinan digital tanpa harus bergantung pada data primer lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Diskominfo Kota Padang sebagai Konteks Kajian

Berdasarkan kajian dokumen resmi dan literatur yang tersedia, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Padang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang. Diskominfo memiliki tugas pokok menyelenggarakan layanan e-government, pengelolaan data dan statistik daerah, serta pembinaan komunikasi publik. Sebagai instansi yang secara langsung bertanggung jawab atas infrastruktur digital pemerintah daerah, Diskominfo menjadi barometer kesiapan digital birokrasi Kota Padang dalam mewujudkan amanat Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

Dalam struktur pemerintahan daerah, Diskominfo Kota Padang memiliki peran ganda: sebagai pengelola infrastruktur TIK dan sekaligus sebagai penggerak transformasi digital birokrasi. Peran ini menempatkan Diskominfo pada posisi strategis yang menuntut kepemimpinan dengan kompetensi digital tinggi, karena setiap kebijakan yang dihasilkan akan berdampak langsung pada kualitas layanan e-government di Kota Padang. Kajian terhadap konteks ini penting untuk memahami tantangan dan peluang yang dihadapi kepemimpinan digital dalam mengambil keputusan berbasis data di level pemerintahan daerah (Aditya & Kosasih, 2024).

Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat memiliki kompleksitas pelayanan publik yang tinggi, dengan beragam kebutuhan masyarakat yang harus difasilitasi melalui sistem e-government yang andal. Dalam kerangka ini, Diskominfo tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan teknis, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi. Posisi strategis inilah

yang menjadikan kualitas kepemimpinan digital di Diskominfo memiliki efek berlipat (multiplier effect) terhadap keseluruhan ekosistem tata kelola digital di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Kesenjangan Infrastruktur Digital dan Kapasitas Kepemimpinan

Berdasarkan kajian awal terhadap literatur, masih terdapat kesenjangan antara ketersediaan infrastruktur digital dan kemampuan pemimpin dalam memanfaatkan data sebagai basis keputusan di banyak instansi pemerintah daerah. Kondisi ini mendorong perlunya kajian mendalam mengenai bagaimana kepemimpinan digital seharusnya diimplementasikan dalam proses pengambilan keputusan berbasis data, khususnya dalam konteks Diskominfo Kota Padang (Maritha, 2022).

Kesenjangan tersebut termanifestasi dalam beberapa bentuk. Pertama, meskipun infrastruktur jaringan dan perangkat keras telah tersedia secara memadai di banyak Diskominfo daerah, pemanfaatannya untuk mendukung pengambilan keputusan strategis masih jauh dari optimal. Kedua, data yang dihasilkan oleh berbagai sistem informasi yang beroperasi di lingkungan pemerintah daerah seringkali bersifat silo yaitu tidak terhubung satu sama lain sehingga tidak dapat diakses secara terintegrasi oleh pimpinan. Ketiga, kompetensi kepemimpinan digital di kalangan pejabat struktural masih sangat bervariasi, di mana sebagian besar masih terbiasa dengan pola pengambilan keputusan konvensional yang bertumpu pada laporan manual dan intuisi pengalaman.

Kondisi kesenjangan ini sejalan dengan temuan kajian digital leadership dan digital governance di Kota Tangerang yang menemukan bahwa resistensi budaya birokrasi konvensional, keterbatasan infrastruktur data yang terintegrasi, serta rendahnya literasi digital di kalangan pejabat struktural menjadi hambatan utama yang perlu diatasi secara sistematis (Aditya & Kosasih, 2024). Dengan demikian, persoalan bukan semata-mata pada ketersediaan teknologi, melainkan pada kesiapan dan kapasitas kepemimpinan dalam memanfaatkan teknologi tersebut sebagai alat pengambilan keputusan yang berbasis bukti.

Kesenjangan ini juga dapat dipahami melalui lensa teori bounded rationality yang dikemukakan Herbert Simon. Pemimpin tidak selalu memiliki kapasitas kognitif dan institusional yang cukup untuk mengolah seluruh data yang tersedia menjadi keputusan yang optimal. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan kapasitas kepemimpinan digital harus sejalan dengan investasi dalam sistem pendukung keputusan yang mampu menyederhanakan kompleksitas data menjadi informasi yang relevan, ringkas, dan mudah ditindaklanjuti oleh pimpinan dalam konteks pengambilan keputusan sehari-hari di lingkungan birokrasi daerah.

Karakteristik Kepemimpinan Digital yang Relevan bagi Diskominfo

Berdasarkan sintesis literatur, kepemimpinan digital yang efektif di instansi seperti Diskominfo mensyaratkan beberapa karakteristik utama. Pemimpin digital harus mampu mendigitalkan lingkungan kerja dan budaya organisasinya secara menyeluruh sehingga setiap proses kerja berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi (Tulungen et al., 2022). Dalam konteks Diskominfo Kota Padang sebagai leading sector e-government, hal ini berarti pimpinan tidak hanya berperan sebagai administrator, tetapi juga sebagai agen transformasi digital yang aktif mendorong pemanfaatan teknologi dalam setiap lini kerja organisasi.

Karakteristik kepemimpinan digital yang matang mencakup tiga dimensi utama (Maritha, 2022):

- a. Dimensi visi digital, yaitu kemampuan pimpinan merumuskan dan mengkomunikasikan arah transformasi digital organisasi secara jelas dan terukur.
- b. Dimensi kompetensi teknologi, yaitu pemahaman pimpinan terhadap ekosistem digital yang dikelolanya, termasuk sistem data, infrastruktur TIK, dan platform e-government.

- c. Dimensi kepemimpinan perubahan, yaitu kemampuan pimpinan mendorong adaptasi budaya organisasi menuju budaya kerja berbasis data dan digital.

Kajian pada Ditjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa kepemimpinan digital yang efektif mendorong pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal sehingga menghasilkan perbaikan pelayanan publik berbasis digital secara nyata dan terukur. Temuan ini relevan untuk Diskominfo Kota Padang yang memiliki mandat serupa di level daerah (Cahyarini, 2021). Kepemimpinan digital yang tidak terlembagakan dalam sistem dan prosedur organisasi yang baku akan bersifat temporer dan rentan terhadap pergantian kepemimpinan (Maritha, 2022).

Kajian terhadap implementasi digital leadership dalam digital governance di Kota Tangerang menunjukkan bahwa pemimpin digital yang berhasil adalah mereka yang mampu mengintegrasikan teknologi ke dalam seluruh proses tata kelola pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi program. Temuan ini menjadi referensi penting bagi Diskominfo Kota Padang dalam membangun model kepemimpinan digitalnya (Aditya & Kosasih, 2024).

Lebih jauh, teori kepemimpinan berbasis kompetensi menekankan tiga dimensi yang harus dimiliki pemimpin masa kini: kompetensi teknis, kompetensi interpersonal, dan kompetensi konseptual. Dalam konteks e-government, kompetensi teknis kini mencakup literasi digital dan pemahaman ekosistem data, sementara kompetensi konseptual mencakup kemampuan memetakan tantangan transformasi digital dan merumuskan solusi strategis berbasis teknologi. Ketiga dimensi ini harus berjalan sinergis agar pemimpin digital tidak hanya cakap secara teknologis, tetapi juga mampu memimpin manusia dan merumuskan arah organisasi yang adaptif di tengah perubahan teknologi yang akseleratif.

Proses Ideal Pengambilan Keputusan Berbasis Data di Era E-Government

Kajian literatur menunjukkan bahwa pengambilan keputusan berbasis data merupakan salah satu indikator utama kematangan kepemimpinan digital di sektor publik. Proses ini tidak berlangsung secara spontan, melainkan melalui tahapan yang sistematis dan didukung oleh ekosistem data yang terkelola dengan baik. Dengan adanya penggunaan big data, proses pengambilan keputusan oleh pimpinan akan lebih dipermudah karena data memberikan landasan yang objektif dan terukur (Tulungen et al., 2022).

Berdasarkan sintesis literatur, terdapat tiga tahapan ideal dalam pengambilan keputusan berbasis data yang seharusnya diterapkan di instansi seperti Diskominfo (Purwoko et al., 2022):

- a. Tahap pengumpulan dan integrasi data, di mana seluruh sistem informasi yang dikelola Diskominfo terhubung dalam satu platform data terintegrasi yang dapat diakses secara real-time oleh pimpinan.
- b. Tahap analisis data, di mana tim teknis mengolah data yang tersedia menjadi informasi yang relevan, akurat, dan mudah dipahami oleh pimpinan untuk keperluan pengambilan keputusan.
- c. Tahap keputusan berbasis bukti, di mana pimpinan menetapkan kebijakan berdasarkan hasil analisis data, bukan semata-mata berdasarkan intuisi atau pengalaman subjektif.

Pemimpin digital yang efektif adalah mereka yang mampu memanfaatkan ekosistem data untuk menghasilkan keputusan yang tidak hanya cepat, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara publik (Wujarso et al., 2023). Dalam konteks e-government, akuntabilitas keputusan menjadi semakin penting karena menyangkut kepentingan publik dan penggunaan anggaran negara. Keberhasilan e-government di tingkat daerah sangat bergantung pada kemampuan pimpinan dalam memanfaatkan ekosistem teknologi informasi untuk menghasilkan keputusan yang cepat, akurat, dan akuntabel (Purwoko et al., 2022).

Kajian terhadap e-government di Pemerintah Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa instansi yang berhasil mengimplementasikan pengambilan keputusan berbasis data secara konsisten menghasilkan tingkat transparansi publik yang lebih tinggi, efisiensi anggaran yang lebih baik, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah yang meningkat signifikan (Kristian et al., 2023). Temuan ini menguatkan argumen bahwa investasi dalam kepemimpinan digital dan sistem data bukanlah biaya, melainkan investasi strategis bagi kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Selain ketiga tahapan di atas, dimensi akuntabilitas publik menjadi unsur pembeda yang kritical dalam konteks DDDM di sektor publik dibandingkan sektor swasta. Setiap keputusan kebijakan yang didukung data bukan hanya meningkatkan kualitas teknis kebijakan, tetapi juga memperkuat legitimasi demokratis dari kebijakan tersebut di mata masyarakat. DDDM dalam konteks ini bukan sekadar pilihan manajerial, melainkan juga wujud pertanggungjawaban moral pemimpin publik terhadap warga yang dilayaninya, sebuah dimensi etis yang seharusnya menjadi bagian integral dari kesadaran kepemimpinan digital di Diskominfo Kota Padang.

Faktor Pendukung Kepemimpinan Digital dalam Pengambilan Keputusan

Berdasarkan sintesis literatur, terdapat beberapa faktor yang mendukung implementasi kepemimpinan digital dalam pengambilan keputusan berbasis data di instansi pemerintah seperti Diskominfo:

- a. Kerangka regulasi yang kuat. Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE memberikan landasan hukum yang kuat bagi seluruh instansi pemerintah untuk mendigitalkan proses birokrasi. Regulasi yang kuat, ketersediaan anggaran TIK yang memadai, serta dukungan komitmen politik dari kepala daerah merupakan faktor pendukung utama keberhasilan e-government di pemerintah daerah (Kristian et al., 2023).
- b. Ketersediaan infrastruktur TIK yang memadai. Diskominfo Kota Padang sebagai pengelola infrastruktur digital daerah memiliki keunggulan komparatif dalam hal akses terhadap perangkat teknologi, jaringan komunikasi, dan sistem informasi. Infrastruktur yang memadai menjadi prasyarat dasar bagi berjalannya kepemimpinan digital yang efektif (Tulungen et al., 2022).
- c. Dukungan ekosistem digital nasional. Program-program nasional seperti Satu Data Indonesia dan SPBE mendorong terbentuknya ekosistem data yang lebih terintegrasi, yang secara langsung mendukung kemampuan pemimpin daerah dalam mengambil keputusan berbasis data yang lebih komprehensif.

Di luar ketiga faktor di atas, komitmen dan keteladanan dari pimpinan tertinggi organisasi merupakan faktor pendukung yang tidak dapat digantikan oleh teknologi atau regulasi sebaik apapun. Ketika kepala dinas secara konsisten menggunakan data sebagai dasar setiap keputusan yang diambil, baik dalam rapat internal, perencanaan anggaran, maupun evaluasi program, maka sikap tersebut akan mengirimkan sinyal yang kuat kepada seluruh jajaran bahwa pengambilan keputusan berbasis data adalah norma, bukan pengecualian. Keteladanan pimpinan puncak inilah yang pada akhirnya menjadi katalis paling efektif bagi proses transformasi budaya organisasi menuju birokrasi yang benar-benar berbasis data dan bukti.

Faktor Penghambat dan Strategi Penguatan Kepemimpinan Digital

Di sisi lain, kajian literatur juga mengidentifikasi sejumlah faktor penghambat yang umum ditemukan di instansi pemerintah daerah. Transformasi kepemimpinan digital tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya peningkatan kapasitas SDM secara menyeluruh dan berkelanjutan di seluruh jenjang organisasi (Wujarso et al., 2023). Kajian tentang digital leadership dan digital governance di Kota Tangerang menemukan bahwa resistensi budaya birokrasi konvensional, keterbatasan infrastruktur data yang terintegrasi, serta rendahnya literasi digital di kalangan

pejabat struktural menjadi hambatan utama yang perlu diatasi secara sistematis (Aditya & Kosasih, 2024).

Selain itu, ketidakkonsistenan komitmen pimpinan dalam mendorong transformasi digital juga menjadi faktor penghambat yang sering ditemukan. Kepemimpinan digital yang tidak diimbangi dengan sistem dan prosedur yang terlembagakan akan mudah mengalami kemunduran ketika terjadi pergantian pimpinan (Maritha, 2022). Oleh karena itu, transformasi digital harus dibangun sebagai sistem organisasi, bukan sebagai program personal pemimpin.

Berdasarkan kajian literatur, terdapat beberapa strategi yang dapat ditempuh untuk menguatkan kepemimpinan digital di Diskominfo Kota Padang (Purwoko et al., 2022; Wujarso et al., 2023):

- a. Penguatan kapasitas kepemimpinan digital melalui pelatihan terstruktur, benchmarking ke daerah yang lebih maju dalam implementasi e-government, serta program mentoring digital bagi pejabat struktural.
- b. Pembangunan sistem data terintegrasi yang menghubungkan seluruh bidang dalam satu platform, sehingga pimpinan dapat mengakses data secara real-time untuk keperluan pengambilan keputusan.
- c. Transformasi budaya organisasi melalui pendekatan change management yang terstruktur, termasuk pemberian insentif bagi inovasi berbasis data dan penguatan nilai-nilai organisasi yang berorientasi pada bukti dan data.

Dalam dimensi budaya organisasi, resistensi terhadap perubahan adalah respons alami yang akan selalu muncul ketika birokrasi berhadapan dengan tuntutan transformasi yang signifikan. Kepemimpinan digital yang efektif harus mampu mengemas transformasi ini bukan sebagai ancaman terhadap status quo, melainkan sebagai peluang untuk meningkatkan kapasitas dan relevansi organisasi di era digital. Program change management yang terstruktur perlu mengintegrasikan tidak hanya pelatihan teknis, tetapi juga pendampingan perubahan mindset, penghargaan bagi inovasi berbasis data, dan komunikasi organisasi yang konsisten tentang visi transformasi digital. Dengan pendekatan holistik seperti ini, perubahan budaya dapat berjalan secara bertahap namun berkelanjutan, tidak bergantung pada satu orang pemimpin, tetapi mengakar sebagai karakter kolektif organisasi.

Sintesis Kajian: Model Ideal Kepemimpinan Digital dalam Pengambilan Keputusan di Diskominfo

Berdasarkan keseluruhan kajian literatur yang telah dipaparkan, dapat disusun sebuah sintesis model ideal kepemimpinan digital dalam pengambilan keputusan berbasis data yang relevan bagi Diskominfo Kota Padang. Model ini merangkum tiga komponen utama yang saling berkaitan: (1) kapasitas pemimpin, (2) sistem data organisasi, dan (3) budaya kerja berbasis data. Ketiganya harus berjalan secara simultan dan saling menopang agar pengambilan keputusan berbasis data dapat terlembagakan secara permanen dalam organisasi (Maritha, 2022; Wujarso et al., 2023).

Tabel 1. Sintesis Model Ideal Kepemimpinan Digital dalam Pengambilan Keputusan Berbasis Data

Komponen	Indikator	Sumber	Relevansi bagi Diskominfo
Kapasitas Pemimpin	Visi digital, literasi data, kompetensi TIK, kemampuan memimpin perubahan	Maritha (2022); Cahyarini (2021)	Pimpinan sebagai agen transformasi

Sistem Data Organisasi	Integrasi platform data, dashboard real-time, SOP pelaporan, akses data terpusat	Tulungen et al. (2022); Purwoko et al. (2022)	Menghubungkan seluruh bidang
Budaya Kerja Berbasis Data	Kebiasaan menggunakan data dalam rapat, keputusan didukung bukti, inovasi berbasis analitik	Wujarso et al. (2023); Aditya & Kosasih (2024)	Mendorong perubahan kerja norma
Regulasi & Dukungan Institusional	Perpres SPBE, anggaran TIK, komitmen kepala daerah, program nasional Satu Data	Kristian et al. (2023); Perpres No. 95/2018	Landasan hukum dan pendanaan

Sumber: Diolah dari berbagai literatur (2021–2024)

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa kepemimpinan digital yang efektif dalam pengambilan keputusan berbasis data tidak dapat dibangun hanya dari satu sisi saja. Kapasitas pemimpin yang tinggi tanpa didukung oleh sistem data yang terintegrasi dan budaya organisasi yang mendukung tidak akan menghasilkan perubahan yang signifikan. Sebaliknya, infrastruktur data yang canggih pun tidak akan berdaya guna apabila pemimpin tidak memiliki kompetensi dan kemauan untuk memanfaatkannya secara konsisten (Tulungen et al., 2022).

Dalam konteks Diskominfo Kota Padang, model ini memberikan kerangka operasional yang dapat dijadikan acuan dalam menyusun rencana transformasi digital organisasi. Setiap komponen dalam model perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kepemimpinan digital tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang seiring dengan dinamika teknologi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks. Pendekatan yang holistik dan berbasis bukti seperti ini merupakan kunci keberhasilan transformasi digital di sektor pemerintahan daerah (Aditya & Kosasih, 2024; Kristian et al., 2023).

Perbandingan Tingkat Kematangan Kepemimpinan Digital di Instansi Pemerintah Daerah

Kajian literatur menunjukkan bahwa tingkat kematangan kepemimpinan digital di instansi pemerintah daerah di Indonesia sangat beragam, tergantung pada sejumlah faktor kontekstual seperti kapasitas anggaran, komitmen pimpinan, dan kesiapan infrastruktur TIK. Untuk memahami posisi Diskominfo Kota Padang dalam konteks yang lebih luas, perlu dilakukan perbandingan dengan temuan kajian di daerah lain yang telah lebih dulu dikaji dalam literatur.

Kajian di Kota Tangerang menunjukkan bahwa implementasi digital leadership yang terintegrasi dengan digital governance mampu menghasilkan peningkatan kualitas layanan publik digital yang signifikan, terutama dalam hal kecepatan respons terhadap pengaduan masyarakat dan efisiensi proses administrasi internal (Aditya & Kosasih, 2024). Sementara itu, kajian di Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa e-government yang dikelola dengan kepemimpinan yang komit terhadap transparansi data berhasil meningkatkan indeks kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah secara terukur (Kristian et al., 2024).

Perbandingan antar daerah ini relevan sebagai tolok ukur bagi Diskominfo Kota Padang untuk menilai posisi dan kesiapan digitalnya. Kota Padang sebagai salah satu kota besar di Sumatera Barat memiliki potensi yang cukup besar untuk mengembangkan model kepemimpinan digital yang adaptif, mengingat ketersediaan infrastruktur TIK yang relatif lebih baik dibandingkan kabupaten-kabupaten sekitarnya.

Tabel 2. Perbandingan Temuan Kepemimpinan Digital di Beberapa Daerah

Daerah/Instansi	Fokus Kajian	Temuan Utama	Sumber
Ditjen SDPPI Kemkominfo	Digital leadership & kompetensi digital	7 pilar kepemimpinan digital didominasi soft skill;	Cahyarini (2021)

		meningkatkan kualitas layanan digital	
Kota Tangerang	Digital leadership dalam digital governance	Integrasi teknologi dalam tata kelola meningkatkan kualitas layanan publik digital	Aditya & Kosasih (2024)
Kab. Bandung	E-government & transparansi publik	Komitmen kepemimpinan terhadap data meningkatkan kepercayaan masyarakat	Kristian et al. (2023)
Diskominfo Kota Padang	Kepemimpinan digital & keputusan berbasis data	Kesenjangan antara infrastruktur digital dan kemampuan pemimpin memanfaatkan data; memerlukan penguatan kapasitas & integrasi data	Kajian ini (2026)

Sumber: Diolah dari berbagai literatur (2021–2026)

Tabel 2 memperlihatkan bahwa secara umum instansi yang berhasil mengimplementasikan kepemimpinan digital memiliki kesamaan pola: adanya komitmen pimpinan yang kuat, sistem data yang terkelola, dan budaya organisasi yang adaptif terhadap perubahan teknologi. Berbeda dengan Kota Tangerang dan Kabupaten Bandung yang telah menunjukkan hasil nyata dari implementasi kepemimpinan digital, Diskominfo Kota Padang masih menghadapi tantangan mendasar berupa kesenjangan antara ketersediaan infrastruktur dan kapasitas kepemimpinan dalam memanfaatkannya. Temuan komparatif ini menjadi peta jalan (roadmap) yang dapat dijadikan acuan dalam menyusun prioritas pengembangan kapasitas kepemimpinan digital ke depan.

Perbandingan ini juga mengungkapkan bahwa tidak ada formula tunggal yang berlaku universal dalam transformasi kepemimpinan digital. Setiap daerah memiliki konteks, tantangan, dan sumber daya yang berbeda, sehingga strategi yang berhasil di Kota Tangerang atau Kabupaten Bandung perlu diadaptasi bukan sekadar diadopsi mentah-mentah sesuai dengan kondisi spesifik Diskominfo Kota Padang. Pendekatan yang kontekstualisasi seperti ini merupakan ciri khas kepemimpinan digital yang matang: mampu belajar dari pengalaman orang lain sambil tetap peka terhadap keunikan dan dinamika lokal organisasinya sendiri.

Implikasi Kebijakan bagi Diskominfo Kota Padang

Berdasarkan seluruh kajian literatur yang telah dipaparkan, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Diskominfo Kota Padang dalam rangka memperkuat kepemimpinan digital dan pengambilan keputusan berbasis data. Implikasi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh dimensi manajerial, struktural, dan kultural organisasi.

- Implikasi pada dimensi regulasi internal. Diskominfo Kota Padang perlu menyusun regulasi internal berupa Peraturan Kepala Dinas yang secara eksplisit mengatur mekanisme pengambilan keputusan berbasis data, termasuk standar minimal data yang harus tersedia sebelum sebuah kebijakan diputuskan. Regulasi internal ini akan memberikan kepastian hukum dan mendorong seluruh jajaran untuk konsisten dalam menyediakan data yang dibutuhkan pimpinan (Purwoko et al., 2022).
- Implikasi pada dimensi pengembangan SDM. Peningkatan kompetensi digital tidak cukup hanya ditujukan kepada staf teknis, tetapi harus menyentuh seluruh jenjang pimpinan, termasuk eselon III dan IV. Program pelatihan yang bersifat kontekstual terbukti lebih efektif dibandingkan pelatihan generik (Cahyarini, 2021). Oleh karena itu, Diskominfo perlu merancang program pengembangan kapasitas digital yang berbasis pada pemetaan kebutuhan (training needs assessment) yang akurat.

- c. Implikasi pada dimensi teknologi dan infrastruktur. Integrasi sistem informasi antar bidang dalam satu platform data terpusat merupakan prasyarat teknis yang tidak dapat ditawar. Tanpa integrasi ini, data yang tersedia akan tetap bersifat silo sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pimpinan sebagai dasar pengambilan keputusan yang komprehensif (Tulungen et al., 2022). Investasi dalam pembangunan data warehouse atau dashboard terintegrasi menjadi prioritas yang mendesak.
- d. Implikasi pada dimensi budaya organisasi. Transformasi budaya organisasi menuju budaya berbasis data memerlukan kepemimpinan yang konsisten dan keteladanan dari pimpinan puncak. Ketika pimpinan secara konsisten menunjukkan bahwa setiap keputusan yang diambil didukung oleh data yang valid, hal ini akan mendorong seluruh jajaran untuk ikut membudayakan praktik yang sama dalam pekerjaan sehari-hari mereka (Wujarso et al., 2023).

Keempat implikasi kebijakan tersebut perlu dipandang sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi, bukan sebagai daftar intervensi yang berdiri sendiri-sendiri. Regulasi internal akan kehilangan efektivitasnya tanpa SDM yang kompeten untuk melaksanakannya. Infrastruktur data yang terbangun tidak akan optimal tanpa budaya organisasi yang mendukung penggunaannya. Oleh karena itu, Diskominfo Kota Padang perlu merancang peta jalan transformasi digital yang mengintegrasikan keempat dimensi ini dalam satu program besar yang terkoordinasi, dengan target dan indikator capaian yang jelas dan dapat dievaluasi secara berkala.

Tantangan Masa Depan Kepemimpinan Digital di Era Post-Pandemi dan Kecerdasan Buatan

Selain tantangan yang telah diidentifikasi sebelumnya, kajian literatur juga menyoroti tantangan-tantangan masa depan yang perlu diantisipasi oleh kepemimpinan digital di instansi pemerintah seperti Diskominfo. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan machine learning membuka peluang baru sekaligus menghadirkan tantangan baru bagi para pemimpin di sektor publik.

Kajian literatur menunjukkan bahwa pemimpin di era kecerdasan buatan tidak hanya dituntut memahami data, tetapi juga memahami bagaimana algoritma bekerja dan bagaimana hasilnya dapat diinterpretasikan secara tepat untuk keperluan kebijakan publik. Kemampuan ini memerlukan tingkat literasi digital yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang dibutuhkan saat ini (Maritha, 2022). Bagi Diskominfo Kota Padang, antisipasi terhadap tantangan ini perlu dimulai dari sekarang melalui perencanaan pengembangan kapasitas jangka panjang.

Di sisi lain, perkembangan regulasi terkait keamanan data dan privasi juga menjadi tantangan tersendiri. Pemimpin digital di instansi yang mengelola data publik seperti Diskominfo harus mampu menyeimbangkan antara pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan di satu sisi, dengan kewajiban menjaga keamanan dan privasi data warga di sisi lain. Keseimbangan ini memerlukan kompetensi etika digital yang semakin relevan untuk dikembangkan (Purwoko et al., 2022).

Tabel 3. Peta Tantangan dan Rekomendasi bagi Kepemimpinan Digital Diskominfo

No	Tantangan	Dampak jika Tidak Diatasi	Rekomendasi
1	Rendahnya literasi digital pimpinan	Keputusan tidak berbasis data; kebijakan tidak akurat	Pelatihan digital leadership berbasis kebutuhan
2	Data antar bidang tidak terintegrasi	Informasi tidak komprehensif; keputusan parsial	Bangun platform data terpusat/dashboard terintegrasi

No	Tantangan	Dampak jika Tidak Diatasi	Rekomendasi
3	Resistensi budaya birokrasi konvensional	Transformasi digital stagnan; inovasi terhambat	Program change management & insentif inovasi
4	Ancaman keamanan data publik	Kebocoran data warga; hilangnya kepercayaan publik	Tata kelola keamanan data & pelatihan etika digital
5	Perkembangan AI & teknologi baru	Diskominfo tertinggal dari perkembangan global	Perencanaan kapasitas digital jangka panjang

Sumber: Diolah dari berbagai literatur (2021–2024)

Tabel 3 merangkum lima tantangan utama yang perlu mendapat perhatian serius dari kepemimpinan Diskominfo Kota Padang. Setiap tantangan memiliki dampak yang berbeda-beda, namun secara keseluruhan bermuara pada satu risiko yang sama: menurunnya kualitas kepemimpinan digital dan pengambilan keputusan yang tidak berbasis bukti. Rekomendasi yang dirumuskan bersifat praktis dan dapat langsung ditindaklanjuti dalam rencana kerja tahunan Diskominfo (Wujarso et al., 2023; Maritha, 2022).

Secara keseluruhan, kajian literatur ini menegaskan bahwa kepemimpinan digital bukan sekadar tren global yang harus diikuti, melainkan sebuah kebutuhan fundamental bagi instansi seperti Diskominfo Kota Padang yang mengemban mandat strategis sebagai motor penggerak e-government di tingkat daerah. Pemimpin yang mampu mengintegrasikan data ke dalam setiap aspek pengambilan keputusan akan menjadi fondasi kokoh bagi terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik (Aditya & Kosasih, 2024; Kristian et al., 2023). Perkembangan AI dan teknologi baru yang terus bergerak dengan cepat menjadikan penguatan kapasitas kepemimpinan digital bukan sekadar agenda satu periode, melainkan komitmen berkelanjutan yang harus diwariskan dari satu generasi kepemimpinan ke generasi berikutnya dalam ekosistem birokrasi digital Kota Padang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan digital merupakan faktor krusial dalam keberhasilan pengambilan keputusan berbasis data pada era e-government. Pemimpin di instansi seperti Diskominfo Kota Padang dituntut tidak hanya memahami teknologi, tetapi juga mampu membangun ekosistem organisasi yang mendorong pemanfaatan data secara sistematis sebagai landasan setiap keputusan strategis.

Kajian literatur mengidentifikasi bahwa masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara ketersediaan infrastruktur digital dan kemampuan pemimpin dalam memanfaatkan data sebagai basis keputusan di banyak instansi pemerintah daerah, termasuk dalam konteks Diskominfo Kota Padang. Kesenjangan ini hanya dapat diatasi melalui penguatan tiga faktor utama yang saling berkaitan: kompetensi digital pimpinan, integrasi infrastruktur data, dan transformasi budaya organisasi. Ketiga faktor ini harus dibangun secara simultan dan sistematis agar pengambilan keputusan berbasis data dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Faktor penghambat utama meliputi resistensi budaya birokrasi, keterbatasan SDM digital, dan belum terintegrasinya sistem data antar unit kerja.

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan kajian literatur, disarankan: (1) Diskominfo Kota Padang perlu memperkuat program peningkatan kapasitas kepemimpinan digital bagi pejabat struktural melalui pelatihan dan benchmarking ke daerah yang sudah berhasil mengimplementasikan e-

government; (2) perlu dibangun sistem integrasi data antar bidang yang terpusat dan mudah diakses oleh pimpinan sebagai dasar pengambilan keputusan; (3) perlu disusun SOP pengambilan keputusan berbasis data sebagai panduan baku di seluruh jenjang pimpinan; dan (4) transformasi budaya organisasi perlu dilakukan secara bertahap dan konsisten melalui program change management yang terstruktur dan didukung komitmen penuh dari pimpinan tertinggi.

REFERENSI

- Aditya, T. A., & Kosasih, A. (2024). Digital Leadership dalam Digital Governance untuk Pelayanan Publik Digital di Kota Tangerang. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(1), 639–652.
- Cahyarini, F. D. (2021). Implementasi Digital Leadership dalam Pengembangan Kompetensi Digital pada Pelayanan Publik. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 25(1), 47–60.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Sekretariat Negara RI.
- Kristian, I., Nuradhawati, R., & Ristala, H. (2024). Peran E-Government dalam Meningkatkan Transparansi Publik di Indonesia (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bandung). *Jurnal Academia Praja*, 7(2), 252–263.
- Maritha, D. (2022). Karakteristik Digital Leadership di Era Digital Transformation. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 12(02), 1–12.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sekretariat Negara RI.
- Purwoko, S., Rokhman, A., & Tobirin. (2022). E-Leadership: Konsep dan Pengaruh Kepemimpinan Digital dalam Transformasi Digital di Sektor Pemerintahan. Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper 2022 Magister Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 170–181.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tulungen, E. E. W., Saerang, D. P. E., & Maramis, J. B. (2022). Transformasi Digital: Peran Kepemimpinan Digital. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 10(2), 1116–1123.
- Wujarso, R., Pitoyo, B. S., & Prakoso, R. (2023). Peran Kepemimpinan Digital dalam Era Digital. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research (JISAMAR)*, 7(1), 1–9.